



Pembangunan Sejuta Rumah Perdesaan Libatkan Koperasi BUMDes

JAKARTA, TRIBUN - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah di perdesaan akan melibatkan koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fahri menjelaskan, ini merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk 80.000 koperasi.

"Salah satunya nanti menjadi koperasi perumahan. Kenapa koperasi? Supaya jiwa individualismenya berkurang, kegotongroyongannya bertambah," ucap Fahri usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut dia, banyak orang yang tinggal di perdesaan ketika merenovasi rumah hanya memberikan makan bagi tetangga yang membantu. "Itu *enggak* perlu ada uangnya *gitu* hanya *ngajak* orang-orang di sekitar rumah dan keluarga sendiri. Jadi, di desa itu aktivitasnya adalah koperasi BUMDES UKM,"

tambah dia.

Sementara fenomena berbeda terjadi di perkotaan. Sebab, ongkos untuk merenovasi rumah lebih mahal. Dengan demikian, pemerintah melibatkan seluruh pihak, tak terkecuali dengan masuknya investasi dari luar negeri. "Itu silakan semua terlibat termasuk investasi luar negeri *gitu*," tandas dia.

Di sisi lain, Fahri juga meminta agar tanah-tanah negara di perkotaan dijadikan rumah susun (rusun). Mengingat, angka *backlog* perumahan menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tembus 15 juta unit. Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar 9,9 juta unit *backlog* perumahan. "Ini nanti untuk Dirjen (Direktur Jenderal) Perkotaan, Ibu Sri, pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota. Kita bangun, kita minta para pengembang untuk membangun," tegas Fahri.

Setelahnya, tanah-tanah tersebut bisa dihitung harganya untuk menjadi elemen subsidi bagi ne-

gara. Setelah urusan pertanahan maupun perizinan bersih, maka bisa dihitung berapa besaran biaya jual beserta keuntungan yang diperoleh. "Kita bisa putuskan kira-kira harganya berapa. Itu sudah turun 50 persen Pak. Karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," lanjutnya. Fahri menambahkan, solusi ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. "Artinya, orang yang sebenarnya tidak punya rumah itu makin banyak," kata Fahri.

Menurut dia, banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah karena adanya sistem *extended family* (penambahan keluarga) di Indonesia. Artinya, satu keluarga mengabsorpsi kegagalan anak-anak mereka yang tidak punya rumah, termasuk yang sudah menikah untuk tinggal di satu rumah yang sama dengan orang tuanya. Selain itu, juga ada fenomena orang yang tidak mau berpisah dari anak-anaknya, meskipun mereka sudah menikah. **(kpc)**